

PENGELOLAAN RISIKO FISKAL PEMERINTAH



*Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*

Semarang , 12 April 2012

OUTLINE



Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal

KONSEP MANAJEMEN RISIKO

- Risiko dan Risiko Fiskal
- Klasifikasi/Jenis Risiko

RISIKO FISKAL

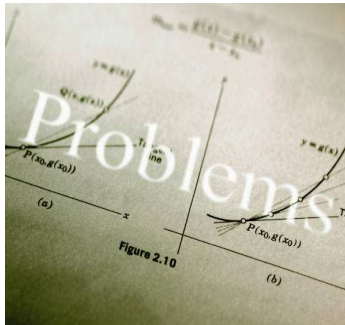
- Definisi Risiko Fiskal
- Tujuan Pengelolaan Risiko Fiskal
- Perlunya Unit Pengelola Risiko Fiskal
- Potensi Sumber Risiko Fiskal
- Pengungkapan Risiko Fiskal
- Risiko Fiskal dalam NK dan APBN tahun 2012

OVERVIEW BADAN KEBIJAKAN FISKAL

- Tugas Pokok dan Fungsi
- Peran BKF

UNIT PENGELOLA RISIKO FISKAL

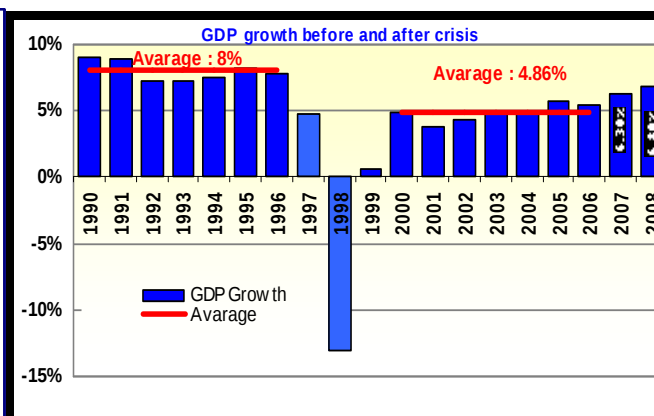
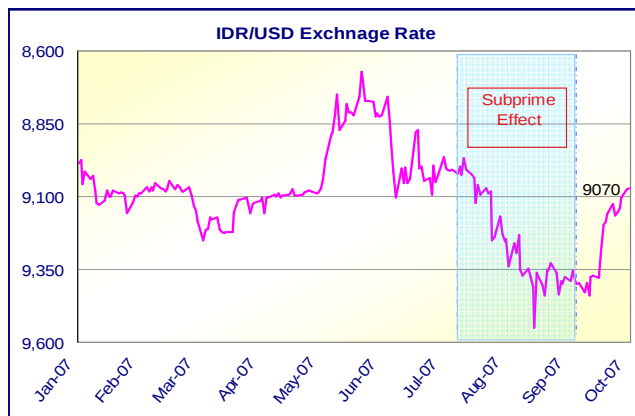
- Latar Belakang
- Perlunya Unit Pengelola Risiko Fiskal
- Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF)





Badan Kebijakan Fiskal
Departemen Keuangan

KONSEP RISIKO



RISIKO DAN RISIKO FISKAL



Risiko



the 'effect of uncertainty on objectives'. It includes both negative and positive impacts on objectives (ISO 31000 : 2009)

the chance of something happening that will have an impact on Objectives (AS/NZS 4360:2004)



Risiko
Fiskal

Cebotari, Aliona, dkk (2008)

- *“the possibility of deviations in fiscal variables from what was expected at the time of the budget or other forecast”.*

Brix, Hanna Polackova dan Allen Shick (2002)

- *“a source of financial stress that could face a government in the future”.*

Nota Keuangan dan APBN Tahun 2012

- potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah

KLASIFIKASI/JENIS RISIKO



Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal



Risiko Keuangan

fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro



Risiko Pasar

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar
Dalam konteks negara, risiko pasar diartikan sebagai perubahan asumsi makro ekonomi yang ditetapkan pemerintah dalam APBN.

Risiko Hukum

Risiko yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tiadanya undang undang yang mendukung atau kelemahan perikatan.



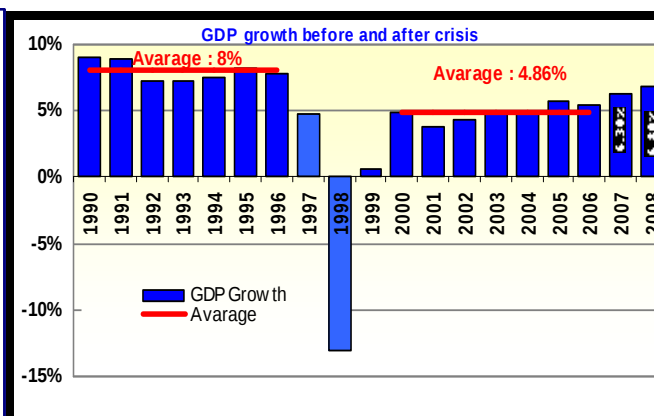
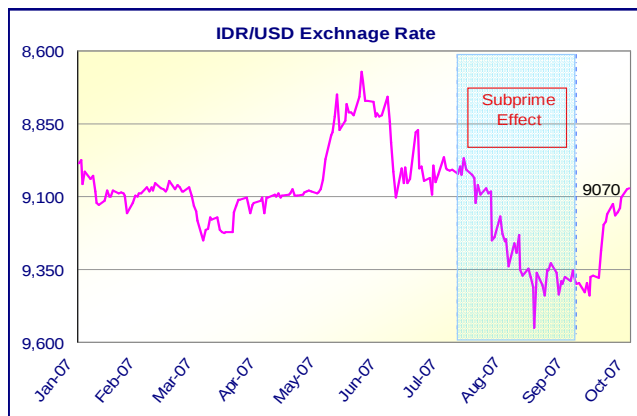
Risiko

Risiko ini timbul karena tidak berfungsinya proses internal (process factors), adanya kecurangan (human factors) dan kegagalan sistem (system factors).



Badan Kebijakan Fiskal
Departemen Keuangan

RISIKO FISKAL



DEFINISI RISIKO FISKAL



Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal

1. World Bank (Fiscal Risk Matrix)

Sumber Risiko Fiskal	Tingkat Kepastian Timbulnya Kewajiban	
	Direct	Contingent
Explicit	- Utang pemerintah	- Dukungan/Jaminan pemerintah pada proyek kerjasama infrastruktur
Implicit	Future health care and social security financing	- Bencana alam

Pemerintah dihadapkan pada empat jenis risiko fiskal yang merupakan kombinasi dari empat karakteristik :

- ❑ Unsur *explicit* dan *implicit*: dasar timbulnya kewajiban pemerintah (peraturan /perjanjian yang tersurat atau kewajiban moral yang tidak tersurat).
- ❑ Unsur *direct* dan *contingent* : gambaran tingkat kepastian timbulnya kewajiban pemerintah

Sumber: Polackova (1998), World Bank (1998)

DEFINISI RISIKO FISKAL (CONT)



Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal

2. International Monetary Fund

- ❑ Broadly defined as short- to medium-term variations in the level of government expenditures, revenues, assets, and liabilities, that are not anticipated in the budget estimates .
- ❑ Include assessment of the impact of variations in key assumptions underlying the macroeconomic forecasts, as well as contingent expenditures and other sources of uncertainty that might impact spending and public debt

3. Australia Budget Paper

- ❑ Fiscal Risk: General developments or specific events which may have an effect on the fiscal outlook . Fiscal risks may affect expenses and revenue and may be positive or negative.
- ❑ Contingent liabilities: Possible liabilities that may arise from past events but which can only be confirmed by the incidence or non-occurrence of uncertain future events that are not within the control of the entity. They include legal proceedings and disputes, loan guarantees, warranties, indemnities, uncalled capital, and letters of comfort

TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO FISKAL



Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal



- **Transparansi**

pengungkapan risiko fiskal diperlukan untuk menciptakan keterbukaan tentang posisi fiskal Pemerintah

- **Kesinambungan APBN**

dan untuk lebih menjamin terjaganya kesinambungan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.



PERLUNYA UNIT PENGELOLA RISIKO FISKAL



Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal

Kebijakan
Kekinambungan
Fiskal (*Fiscal
Sustainability*)



1. Max defisit:
3% dari PDB
2. Max Pinjaman Pem :
60% dari PDB



Untuk menjaga dan
memantau keadaan
tersebut diperlukan
Manajemen Risiko
Fiskal



Tekanan Risiko
Fiskal :



Dibentuk Pusat
Pengelolaan Risiko
Fiskal (PPRF)

Dukungan Pemerintah terhadap Proyek
Infrastruktur

Perubahan Keadaan Ekonomi Global

Aksi Korporasi BUMN

POTENSI SUMBER RISIKO FISKAL



Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal

Dukungan Pemerintah terhadap Proyek Infrastruktur:

Surat dukungan Pemerintah (guarantee letter, Confirmation note, dll)

Dukungan Pemerintah lainnya (Viability Gap Fund/VGF, Subsidi bunga kredit investasi, dll)



Perubahan Keadaan Ekonomi Global:

Perubahan harga komoditas (khususnya minyak mentah)

Kondisi ekonomi global

Perubahan rating Pemerintah, dll.



Aksi Korporasi BUMN:

Investasi (Pinjaman Komersial Luar Negeri, Penyertaan Modal Negara, Privatisasi[IPO])

Inefisiensi BUMN (PMN, Restrukturisasi)

Kebijakan yang mengikat BUMN (PSO)



PENGUNGKAPAN RISIKO FISKAL



Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal



Mulai tahun 2008, di dalam nota keuangan yang disampaikan Pemerintah kepada DPR dicantumkan subbab mengenai risiko fiskal.

Subbab ini memberikan informasi mengenai risiko fiskal yang dihadapi oleh pemerintah tahun anggaran yang bersangkutan, termasuk mencantumkan di dalamnya mengenai kewajiban kontinjensi.

Subbab ini akan terus dicantumkan pada Nota Keuangan tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya.

Pengungkapan risiko fiskal memiliki empat tujuan:

- peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal,
- meningkatkan keterbukaan (*transparency*) fiskal,
- meningkatkan tanggung jawab (*accountability*) fiskal,
- menciptakan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

RISIKO FISKAL DALAM NOTA KEUANGAN DAN APBN TAHUN 2012



Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal

Analisis Sensitivitas

- Pengaruh dinamika ekonomi makro terhadap APBN dapat digambarkan dalam suatu analisis sensitivitas.
- Dalam analisis ini, indikator-indikator ekonomi makro memengaruhi APBN secara langsung terhadap perubahan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN dan secara tidak langsung melalui kontribusi BUMN terhadap APBN.

Risiko Utang Pemerintah

- Interest Rate Risk: potensi tambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang berpotensi meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban utang Pemerintah.
- Exchange Rate Risk: potensi peningkatan beban kewajiban Pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang akibat peningkatan kurs nilai tukar valuta asing terhadap mata uang Rupiah.
- Refinancing Risk: potensi naiknya tingkat biaya utang pada saat melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*).

RISIKO FISKAL DALAM NOTA KEUANGAN DAN APBN TAHUN 2012



Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal

Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat

- Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa (*event*), yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah.
- Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran.

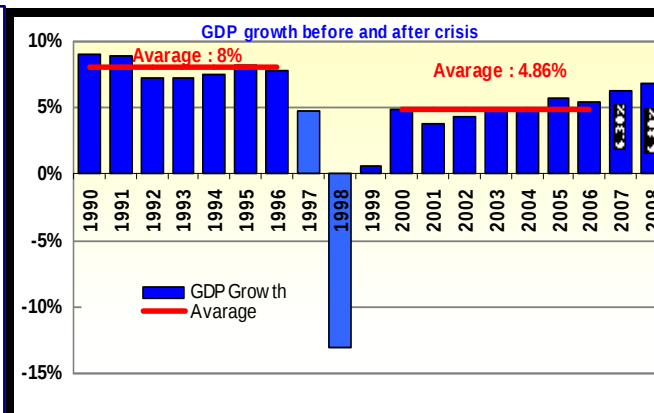
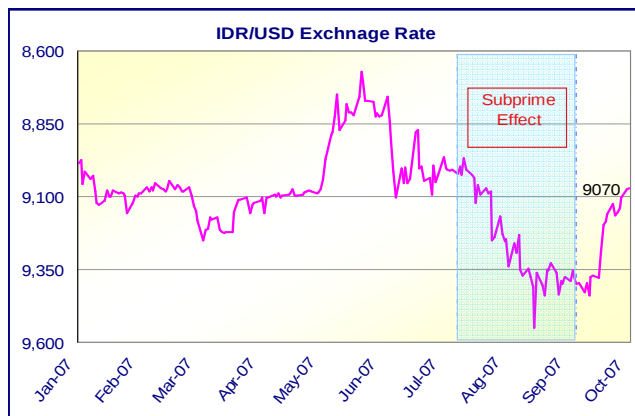
Desentralisasi Fiskal

- Risiko fiskal dari kebijakan desentralisasi fiskal diantaranya bersumber dari:
 - kebijakan alokasi dana transfer ke daerah,
 - kebijakan pemekaran daerah,
 - pinjaman daerah, serta
 - pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah, yaitu BPHTB serta PBB-Perdesaan dan Perkotaan.



Badan Kebijakan Fiskal
Departemen Keuangan

OVERVIEW BADAN KEBIJAKAN FISKAL



BKF : TUGAS & FUNGSI



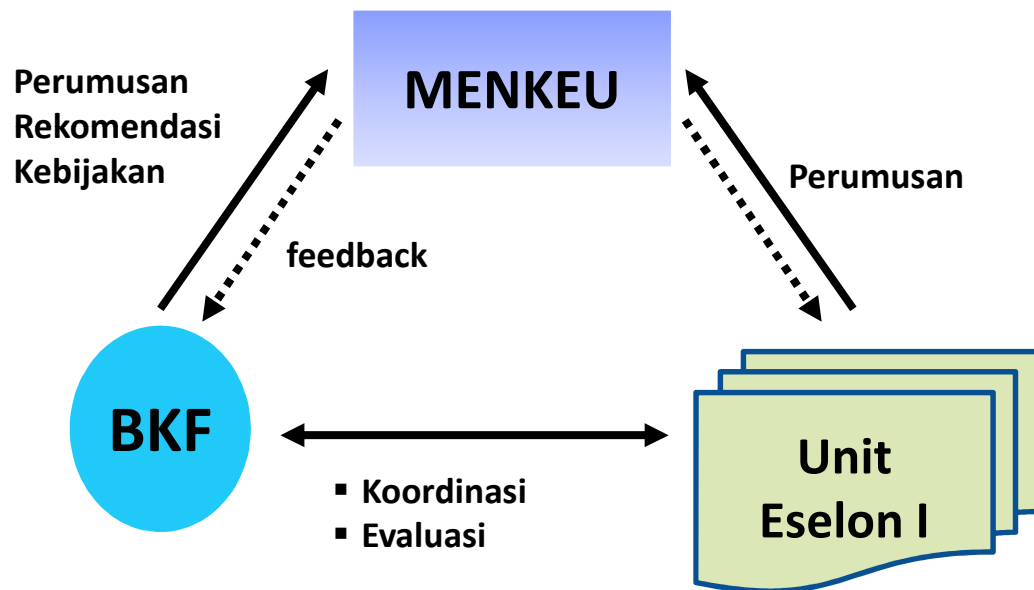
Melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal, dan kerja sama internasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



1. perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta proyeksi ekonomi makro;
2. penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara dan risiko fiskal;
3. analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan ekonomi dan keuangan;
4. analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi dan keuangan, risiko BUMN, dan risiko dukungan pemerintah;
5. analisis dan perumusan rekomendasi terhadap kelayakan pemberian dukungan pemerintah atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur;
6. analisis, perumusan rekomendasi dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;

Peran BKF (PMK 44/2007 & PMK 100/2008)

Proses Bisnis Perumusan Kebijakan Fiskal



BKF mengkoordinasikan pembahasan dengan DPR RI atas :

- Pokok Pokok Kebijakan Fiskal
- Asumsi Makro
- Pendapatan Negara
- Defisit dan Pembiayaan Anggaran
- Risiko Fiskal

2. UNIT PENGELOLAAN RISIKO FISKAL

- Latar Belakang
- Perlunya Unit Pengelola Risiko Fiskal
- Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF)
- Skema Pengelolaan Risiko Fiskal

Pengalaman Great Depression 30-an

- Pemulihan berlangsung dalam waktu 10 tahun, 1929-1940.



Black Thursday, 1929



1930-1935 setiap tahun PHK 3 juta



Stimulus Fiskal, 1932



New Deal: Roosevelt

Pengalaman Krisis 1998

- Periode Pemulihan 5 tahun, 1998-2003



Krisis Moneter dan
Pasar Uang, 1997



Mahasiswa turun ke
jalan & Soeharto jatuh
1998



Likuidasi 16 Bank
Nasional, 1997

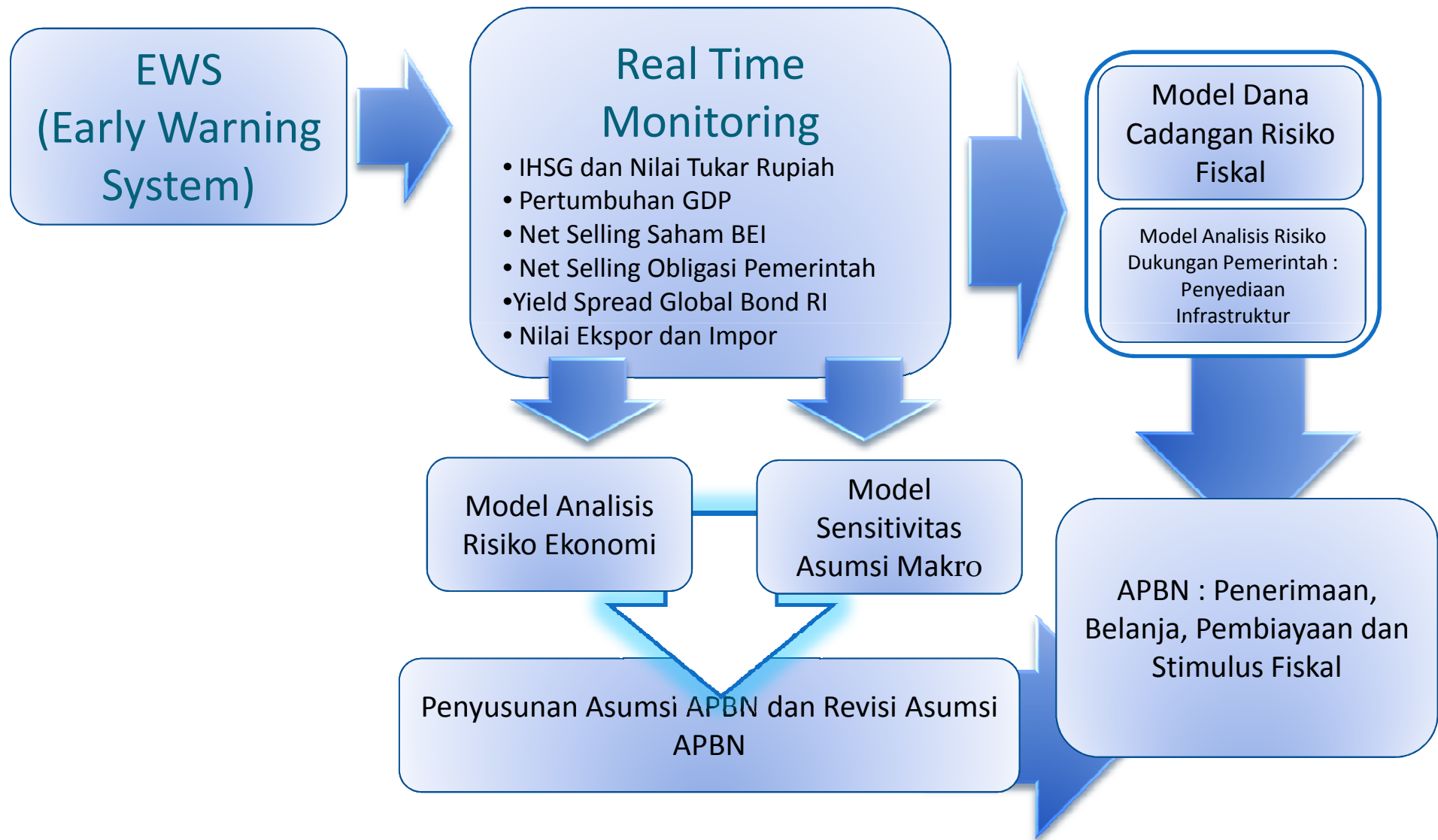


Pemulihan: keluar dari
Program IMF, 2003

Belajar dari pengalaman krisis.....

- Mulai tahun 2008, di dalam nota keuangan yang disampaikan Pemerintah kepada DPR dicantumkan subbab mengenai risiko fiskal.
- Subbab ini memberikan informasi mengenai risiko fiskal yang dihadapi oleh pemerintah tahun anggaran yang bersangkutan, termasuk mencantumkan di dalamnya mengenai kewajiban kontinjensi.
- Subbab ini akan terus dicantumkan pada Nota Keuangan tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya.

Mengambil pelajaran dari krisis 1997/1998, Kemenkeu (BKF) membangun EWS dan Model Sensitivitas Dampak Fiskalnya



Mengapa Perlu Unit Pengelola Risiko Fiskal ?

Kebijakan
Kestinambungan Fiskal
(*Fiscal Sustainability*)

1. Max defisit:
3% dari PDB
2. Max Pinjaman Pem :
60% dari PDB

Untuk menjaga dan
memantau keadaan
tersebut diperlukan
Manajemen Risiko Fiskal



Dibentuk Pusat
Pengelolaan Risiko Fiskal
(PPRF)

Tekanan Risiko Fiskal :

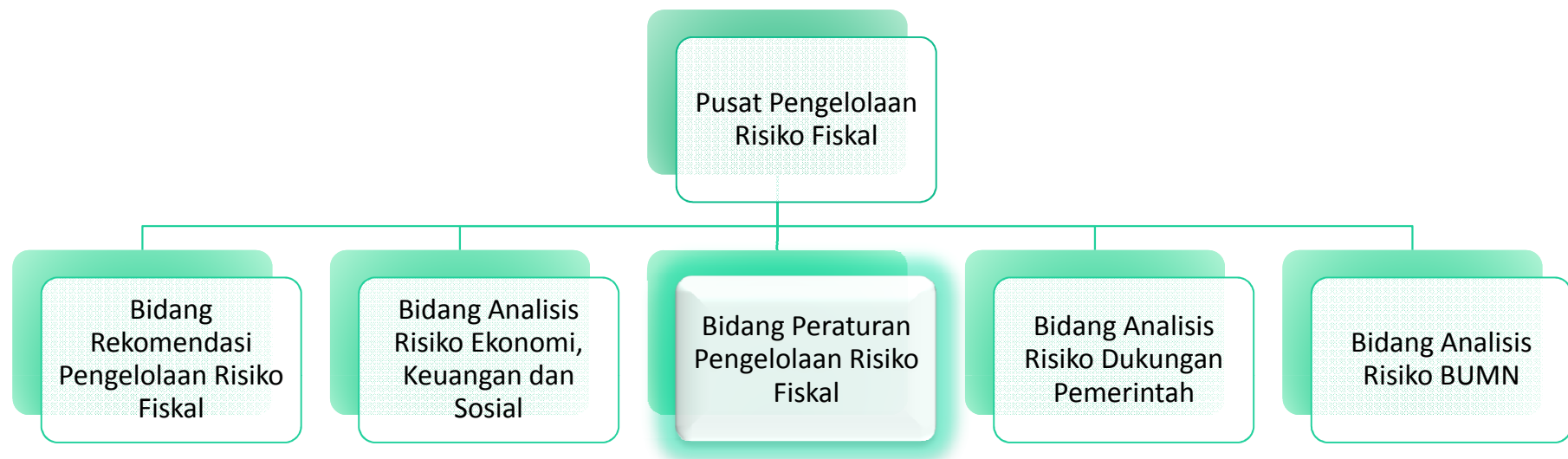
Dukungan Pemerintah terhadap Proyek
Infrastruktur

Perubahan Keadaan Ekonomi Global

Aksi Korporasi BUMN



Struktur Organisasi Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal



Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN, dan dukungan pemerintah (Proyek Infrastruktur & Investasi Pemerintah).



Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal

Terima Kasih

